PELAKSANAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ULAYAT PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Hanan Hamidah 2010012111185

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2024

No. Reg:613/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 613/Pdt/02/II-2024

Nama

: Hanan Hamidah

NPM

2010012111185

Bagian

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dalam Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Ulayat Pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian **Hukum Perdata**

(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ULAYAT PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

Hanan Hamidah¹, Desmal Fajri¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹ Empila barankamidak 2002@gmail.com

Email: hananhamidah2002@gmail.com

ABSTRACT

The follow-up of the pilot project program for land titling of customary nagari land is carried out by the Tanah Datar District National Land Agency which aims to provide legal certainty and prevent disputes related to land ownership. Based on the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 18 of 2019 concerning procedures for administering customary land of customary law communities. Problem formulation: 1) How is the implementation of the role of the National Land Agency in certifying property rights on customary land in Tanah Datar Regency? 2) How is the implementation of the National Land Agency's policy in the registration of property rights on customary land in Tanah Datar Regency? Data sources used primary data and secondary data then data collection techniques using document studies and interviews are analyzed qualitatively. Research results: 1) The implementation of the role of the National Land Agency in the pensertipatan of property rights on customary land in Tanah Datar Regency, namely: Collecting and managing physical data, proving new rights and bookkeeping to facilitating the issuance of certificates. 2) Implementation of the National Land Agency's policy in the registration of property rights on customary land in Tanah Datar Regency, namely: Field Review and Socialization, Socialization of Boundary Mark Preparation, Installation of Boundary Marks, Measurement, Examination of land or field review with the Head of Section of Determination of Rights and Registration of Land Office of Tanah Datar Regency, Registration of HPL application, Examination of HPL application files by the Ministry of ATR / BPN, Issuance of certificates.

Keywords: National Land Agency, Indigenous Peoples, Customary Land.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan pencepatan pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia, dengan berbagai peraturan yang dibuat dan program-program pendaftaran yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang diharapkan pada masyarakat adat dapat melaksanakan pendaftaran semua

tanah terutama tanah adat pada Nagari di Tanah Datar, mengingat tujuan pendaftaran tanah adalah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, bahwasannya

Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. Balobe Law Journal, Volume 1, Nomor 2, hlm. 131.

Neununy, 2021, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak

Kementrian ATR/BPN telah merumuskan program vang dinamakan pilot project yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa terkait kepemilikan tanah. Sehingga BPN Kabupaten Tanah Datar ikut serta dalam tindak lanjut program tanah ulayat tersebut. Di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar terdapat 12 hektare tanah ulayat nagari yang telah disertipikatkan, yang terdiri dari 3 bidang tanah yang memiliki sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti tentang "Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Ulayat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisa pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar.
- Untuk menganalisa kebijakan BPN dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

- 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.
- Sumber Data
 Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
- Teknik Pengumpulan Data
 Teknik pengumpulan data
 menggunakan Studi
 Dokumen dan Wawancara.
- Teknik Analisa Data
 Teknik analisa data
 menggunakan Analisa
 Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Tanah Datar

> Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Didi Mulyadi, mengatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar memainkan peran sentral dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah ulayat, menjelaskan manfaat hukum dan keamanan yang diberikan oleh sertipikat, serta melaksanakan peran dalam hal memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat.

Melalui Program Pilot Project tindak lanjut tanah ulayat dari Kementrian ATR/BPN, tim pelaksana Pilot Project BPN melakukan seleksi bidang tanah ulayat terpilih di Sumatera Barat. dari seleksi tersebut didapatkan sebanyak 30 bidang tanah berada di 6 Kabupaten/Kota dijadikan prioritas penatausahaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Salah satunya yaitu di Kabupaten Tanah Datar.

Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar Pengumpulan vaitu: dan data fisik, pengelolaan Pembuktian hak baru serta pembukuannya hingga memfasilitasi penerbitan sertifikat.

B. Pelaksanaan Kebijakan BPN dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi, mengatakan bahwa pelaksanaan **BPN** kebijakan dalam pensertifikatan hak milik atas tanah ulayat memegang peranan dalam mewujudkan penting keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

 Peninjauan Lapangan dan Sosialisasi

- Sosialisasi Persiapan Tanda Batas
- 3) Pemasangan Tanda Batas
- 4) Pengukuran
- 5) Pemeriksaan tanah atau peninjauan lapangan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
- 6) Pendaftaran permohonan HPL
- 7) Pemeriksaan berkas permohonan HPL oleh Kementrian ATR/BPN
- 8) Penerbitan sertipikat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu:
 - 1) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik
 - Pembuktian hak baru serta pembukuannya hingga
 - 3) Memfasilitasi penerbitan sertifikat.
- Pelaksanaan kebijakan
 Badan Pertanahan Nasional
 dalam pendaftaran hak
 milik atas tanah ulayat di
 Kabupaten Tanah Datar
 yaitu:
 - Peninjauan Lapangan dan Sosialisasi
 - 2) Sosialisasi PersiapanTanda Batas
 - 3) Pemasangan Tanda Batas

- 4) Pengukuran
- 5) Pemeriksaan tanah atau peninjauan lapangan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
- 6) Pendaftaran permohonan HPL
- Pemeriksaan berkas permohonan HPL oleh Kementrian ATR/BPN
- 8) Penerbitan sertipikat.

2. Saran

- a. BPN diharapkan untuk terus terlibat aktif dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan yang melibatkan tanah ulayat, serta melakukan evaluasi dan pembaharuan secara berkala terhadap pendaftaran tanah ulayat.
- b. Masyarakat adat selaku subjek yang dituju dalam pelaksanaan pensertifikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar melalui program *Pilot Project* dengan adanya program ini agar bisa memanfaatkan tanah ulayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muchtar Wahit, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta.

Soedjono dan H. Abdurrahman, 2008, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik,Hak Sewa Guna dan Hak guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatauasahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.